

## RELASI MAYORITAS-MINORITAS DAN RADIKALISME DALAM KONSTRUKSI MEDIA ISLAM

Rusmulyadi - Lida Imelda Cholidah

Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
rusmul@yahoo.co.id dan limeldaz@gmail.com

### Abstract

This research analyzes the issue of majority-minority relations and radicalism which arised in the media during 2015. The Construction of discourse to be traced based on incident of Tolikara and Aceh Singkil to the issue of majority-minority relations and the policy of blocking Islamic media online that promoted radicalism the issue of religious radicalism. Starting from this framework, the formulation of the research to be answered is how the construction built by Islamic media online in Indonesia in the current issues of religious during 2015.As the analysis method of this study would used the analysis of discourse based on the framework of social semiotics M.A.K Halliday. Halliday has developed a framework that makes it possible to analyzed the interaction between text and context that is based on three concepts: field of discourse, tenor of discourse and mode of discourse.

The results indicated that the framework of Islamic media online discourses more positioning itself as media involved in formulating the majority-minority relations. The Islamic media can not be independent when constructing incident of Tolikara and Aceh Singkil were dragging the issue of majority-minority relations.The discourse building of islamic media about radicalism in Indonesia with reflection on blocking Islamic media online focuses more on policy the handling of his radicalism rather than looking into content of Islamic media.

**Keywords:** *Majority-Minority Relations, Radicalism, Discourse, The Media Construction Of Reality.*

### Pendahuluan

Pada Seminar Nasional yang bertajuk Perlindungan Pemerintah Terhadap Pemeluk Agama yang diselenggarakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dalam rangka menyambut Hari Amal Bhakti Kemenag ke-69 Tahun 2015, Menteri Agama Lukman Hakim menyampaikan ada lima

isu penting terkait kehidupan keagamaan di Indonesia yang dinilainya patut menjadi perhatian bersama. *Pertama*, fakta sosiologis tentang adanya pemeluk agama dan kepercayaan lain di luar enam agama yang ada dan diakui di Indonesia. Isu ini muncul dan berkembang seiring aspirasi pemeluk agama di luar Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu agar keyakinan mereka juga bisa disebutkan di dalam kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, buku nikah, dan lain-lain dokumen yang mencantumkan kolom agama. Lebih jauh, mereka juga ingin praktik-praktik ritualnya mendapat tempat sewajarnya di tengah masyarakat.

*Kedua*, efektifitas Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang antara lain mengatur soal kerukunan beragama di tengah banyaknya persoalan diseperti kasus-kasus pendirian rumah. Realitas sosial sampai hari ini setidaknya mengindikasikan bahwa pendirian tempat ibadah selalu memiliki potensi konflik, baik di kalangan para pengikut sesama agama maupun antarumat beragama. *Ketiga*, munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang semakin meningkat. Kemunculan gerakan ini, yang dalam hal tertentu dinilai Menteri Lukman Hakim Syaifudin sudah berlebihan. Peningkatan gerakan keagamaan baru seiring terbukanya masyarakat karena informasi global dapat menimbulkan potensi gesekan dan konflik sosial yang mengganggu kerukunan hidup beragama jika tidak diantisipasi dengan cepat dan tepat.

*Keempat*, adanya tindak kekerasan terutama terhadap kelompok minoritas. Tindak kekerasan atas nama agama seringkali mengalami eskalasi seiring isu relasi mayoritas-minoritas. Diskriminasi dan intimidasi terhadap kaum minoritas dipandang sebagai bentuk pengingkaran atas Hak Asasi Manusia (HAM). Kelima, adanya penafsiran keagamaan tertentu yang kemudian mengancam kelompok agama yang memiliki tafsir berbeda. Penafsiran sempit atas agama bisa mengancam toleransi, malah sampai pada aksi kekerasan, baik kepada antar umat beragama, maupun antara sesama penganut agama yang sama. Dalam ilustrasi Menteri Agama, bahwa ada kelompok yang memahami jihad sebagai perang terhadap musuh-musuh yang memiliki keyakinan berbeda atau yang mendukung musuh berkeyakinan berbeda itu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dikutip dari [Republika.co.id](http://Republika.co.id), dengan judul tulisan "Ada Lima Isu Agama, Apa

Kelima persoalan keagamaan yang disinyalir oleh Menteri Agama tersebut setidaknya bisa dipetakan dalam dua persoalan besar, yaitu isu kebebasan beragama yang terhubung dengan relasi mayoritas-minoritas dan radikalisme atau fundamentalisme dalam tubuh agama. Banyak peristiwa mutakhir yang terjadi dan bisa dijadikan indikasi dari eskalasi atau peningkatan gangguan kehidupan beragama di Indonesia. Kedua persoalan ini membutuhkanantisipasi dan cara penanganannya yang tepat dan bijak, sehingga tidak sampai mengoyak kerukunan dan kehidupan masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa yang majemuk.

Dalam laporan penelitian dua lembaga yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Wahid Institute, pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia selama tahun 2015 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan data Komnas HAM dinyatakan bahwa pengaduan atas kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan pada 2015 meningkat dari 74 pengaduan pada tahun 2014 menjadi 87 pengaduan dengan 93 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bentuk pelanggaran yang paling besar adalah pelarangan dan perusakan tempat ibadah, juga pelarangan, penghalangan dan gangguan atas aktivitas keagamaan serta pembiaran kekerasan.<sup>2</sup>

Sementara dalam catatan Wahid Institute, peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang tahun 2015 mencapai 190 peristiwa dengan 249 tindakan. Jumlah ini naik 23 persen dari tahun 2014 di mana jumlah peristiwa yang dilaporkan 158 peristiwa dengan 187 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Peningkatan kasus kekerasan atas nama agama ini terjadi karena pemerintah dipandang tidak memiliki pola penanganan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan

---

Saja?”, diakses pada tanggal 26/2/2016 pukul 10.01 WIB.

<sup>2</sup> Menurut data Komnas HAM, Jamaah Ahmadiyah Indonesia masih merupakan pihak yang paling banyak menjadi korban. Pemerintah kabupaten dan kota dinilai menjadi pelaku pelanggaran kebebasan dan berkeyakinan terbesar. Pemerintah daerah dianggap kerap mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif dan kebijakan tersebut terkadang memicu timbulnya kekerasan di tengah masyarakat. Jawa Barat, Jakarta dan Jawa Tengah adalah daerah-daerah di mana paling banyak terjadi kasus intoleransi. Dikutip dari <http://www.voaindonesia.com/content/pelanggaran-kebebasan-beragama-meningkat-/3203566.html> dan diakses pada tanggal 27 Februari 2017, pukul 08.35 WIB.

yang tegas, seperti penegakan hukum, pemulihan hak korban dan perundingan terbuka antar pihak yang terlibat konflik agama.<sup>3</sup>

Data Komnas HAM dan Wahid Institute ini berbanding lurus dengan catatan Setara Institute yang melaporkan 197 pelanggaran kebebasan beragama sepanjang 2015. Angka itu meningkat drastis dibanding pada tahun sebelumnya, yakni 134 peristiwa. Jawa Barat disebutkan menjadi wilayah dengan angka pelanggaran tertinggi, yaitu 44 peristiwa, disusul Aceh dengan 34 kejadian. Menurut lembaga itu, persoalan bertambah pelik lantaran pemerintah kabupaten dan kota ikut-ikutan menjadi pelaku pelanggaran. Setidaknya ada 31 kebijakan yang dinilai diskriminatif dan membatasi kehidupan beragama. Keterlibatan pemerintah daerah ini bisa ditelusuri muaranya pada masa pemilihan kepala daerah. Di masa kampanye, banyak calon mengusung sentimen keagamaan untuk memobilisasi suara sekaligus menekan popularitas lawan. Isu yang paling sering "digoreng" adalah ihwal pendirian gereja serta pengikut Syiah dan Ahmadiyah.<sup>4</sup>

Isu kekerasan agama yang terhubung dengan relasi mayoritas-minoritas keagamaan adalah isu yang sangat sensitive dan bisa merusak "kenyamanan" kerukunan beragama di Indonesia. Isu ini semakin menguat manakala muncul kontroversi di seputar pendirian rumah ibadah. Insiden Tolikara, Penghentian pembangunan masjid secara paksa di Bitung, peristiwa Aceh Singkil adalah deretan contoh peristiwa konflik keagamaan yang memunculkan isu relasi mayoritas-minoritas. Oleh karenanya perdebatan di seputar efektifitas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, yang biasa disebut PBM, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pembedayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah sempat mencuat ke publik. Suara mayoritas masih menganggap bahwa kehadiran PBM masih cukup efektif dalam meredam dan meminimalisir konflik keagamaan.

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Menurut Direktur Wahid Institute, Zanuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid menilai ada sejumlah kelompok yang paling sering menjadi korban, yaitu kelompok Ahmadiyah, Syiah dan GAFATAR.

<sup>4</sup> Tempo.com / <http://www.tempo.co/read/opiniKT/2016/01/22/11652>, diakses pada tanggal 27 Februari 2017, pukul 08.57 WIB.

Persoalan yang tidak kalah seriusnya adalah isu radikalisme dalam agama, yang seringkali secara sederhana dinisbatkan pada tubuh Islam. Radikalisme masih menjadi isu yang menarik perhatian publik di Indonesia. Khususnya radikalisme terkait dengan kelompok militan yang mengatasnamakan agama. Isu ini sempat menghangat dan menjadi kontroversial di tahun 2015 manakala Badan Nasional Penanggulangan Teorisme (BNPT) memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memblokir situs Islam yang dipandang menyebarkan kebencian dan menumbuhkan benih radikalisme.

BNPT menyatakan ada empat kriteria radikalisme terhadap 19 situs Islam yang diblokir. Radikalisme menjadi tolak ukur utama. Kriteria yang ditetapkan BNPT meliputi, *pertama*, ingin melakukan perubahan dengan cepat dengan menggunakan kekerasan dan mengatasnamakan agama. *Kedua*, takfiri atau mengkafirkan orang lain. *Ketiga*, mendukung, menyebarkan, mengajak dengan ISIS. *Keempat*, memaknai jihad secara terbatas.

Radikalisme (agama) ditandai oleh tiga kecenderungan umum, yaitu: *Pertama*, radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga, atau nilai-nilai yang dapat bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keadaan yang ditolak. *Kedua*, radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan lain. Ciri ini menunjukkan bahwa di dalam radikalisme terkandung suatu program atau pandangan dunia (*worldview*) tersendiri. Kaum radikal berusaha kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang sudah ada. *Ketiga*, kaum radikal memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Dalam gerakan sosial, kaum radikal memperjuangkan keyakinan yang mereka anggap benar dengan sikap emosional yang menjurus pada kekerasan.<sup>5</sup>

Berkembangnya radikalisme agama di Indonesia merupakan satu kenyataan sosio-historis yang harus diantisipasi dan ditangani dengan tepat ka-

---

<sup>5</sup> Adrian Renaldi, "Radikalisme Agama Ancaman bagi Pemilu 2004?" <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0402/10/opi02.html>, accessed, 12, diakses pada tanggal 28 februari 2017.

rena dapat menjadi ancaman bagi masa depan bangsa yang mendambakan keamanan dan kedamaian. Isu-isu di seputar relasi mayoritas-minoritas dan tumbuh berkembangnya radikalisme keagamaan adalah bagian dari isu-isu kontemporer yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa isu-isu sensitif keagamaan akan mudah menjadi “bola liar” yang bisa merusak bangunan kemajemukan bangsa, atau sebaliknya kalau ditangani dengan tepat akan menjadi modal sosial bagi kemajuan peradaban bangsa yang multicultural.

Studi yang dilakukan ini berupaya menelusuri bagaimana media Islam mengelola isu-isu sensitif keagamaan dalam konstruksi pemberitaannya. Penelitian ini bertolak dari kerangka bahwa konstruksi yang dibangun media lewat teks tidaklah muncul dengan sendirinya, teks selalu ada dalam suatu situasi sosial dengan konteks yang spesifik. Dalam pengertian, teks media merupakan sesuatu yang lahir dari konteks kehidupan sosial masyarakat yang ditampilkan oleh media kemudian diterjemahkan pula oleh masyarakat berdasarkan konteks kehidupan sosial yang berlaku saat itu di tengah masyarakat. Oleh karena media tidak berada dalam ruang yang vakum, bias media menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Media selalu berada di tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik dan fakta yang kompleks dan beragam.

Pada titik ini isu keagamaan yang berkembang di Indonesia sangat mungkin diperkuat dan dipertajam oleh media, terutama media massa yang memiliki afiliasi ideologis dan kepercayaan terkait kelompok yang bertikai. Dan oleh karena media merupakan bagian dari institusi sosial yang penting dari masyarakat, maka apa yang dikonstruksi oleh media memiliki pengaruh yang tidak sedikit dalam membangun opini publik.

Untuk memfokuskan kajian, peneliti berupaya membatasi penelitian pada isu relasi mayoritas-minoritas dan radikalisme yang muncul dan mencuat dalam media Islam selama tahun 2015. Konstruksi wacana yang hendak ditelusuri dan dikaji didasarkan atas peristiwa Tolikara dan Aceh Singkil untuk isu relasi mayoritas-minoritas dan peristiwa pemblokiran situs media Islam yang dianggap mempromosikan radikalisme untuk isu radikalisme keagamaan. Subjek media yang dipilih adalah representasi media Islam online, yaitu *Republika online*, *Dakwatuna.com* dan *Hidayatullah.com*.

Untuk menganalisis konstruksi ketiga media Islam online tersebut tentang isu-isu relasi mayoritas-minoritas dan radikalisme akan digunakan analisa wacana berdasarkan kerangka kerja semiotika sosial M.A.K Halliday sebagai pisau analisis. Halliday telah membangun suatu kerangka kerja yang memungkinkan untuk membedah interaksi antara teks dan konteks yang didasarkan pada tiga konsep: medan wacana (*field of discourse*), pelibat wacana (*tenor of discourse*) dan mode wacana (*mode of discourse*). Medan wacana merujuk pada tindakan sosial yang sedang terjadi atau dibicarakan, aktivitas dimana para pelaku terlibat di dalamnya, serta praktik-praktik yang terlihat dalam teks. Pelibat wacana mengidentifikasi pihak-pihak -pembicara dan sasaran yang terlibat dalam pembicaraan, serta kedudukan dan hubungan di antara mereka. Sedangkan mode wacana merujuk pada pilihan bahasa masing-masing media, termasuk apakah gaya bahasa yang digunakan bersifat eksplanatif, deskriptif, persuasif, metaforis, hiperbolis, dan lain-lain, serta bagaimana pengaruhnya.<sup>6</sup>

### **Islam, Media dan Konstruksi Realitas Media**

Disadari atau tidak fenomena tumbangnya Orde Baru pada bulan Mei 1998 menandai datangnya euforia kebebasan yang nyaris sempurna. Dan bagi kalangan media, itulah untuk pertama kalinya, selama 30 tahun, media massa mengalami kebebasan yang hampir-hampir tak terbatas. Bak gayung bersambut, Yunus Yosfiah, Menteri Penerangan waktu itu, melakukan terobosan penting dengan mempermudah pengurusan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Media-media Islam pun memanfaatkan kondisi tersebut dengan mendirikan media-media agama, dari yang moderat, liberal hingga ekstrem.

Mulai dari media arus utama (*mainstream media*) dan media alternatif (*alternative media*) hingga media khusus (*specific media*) dan media kecil (*small media*), tampil menjadi saluran yang membawa pesan keagamaan, dari yang ekstrem hingga yang elegan. Semua ekspresi keberagaman itu hadir menghiasi publik dan menampilkan identitas pemeluknya. Namun, representasi identitas yang tampil dalam tatanan simbolik media terkadang harus juga

---

<sup>6</sup> Agus Sudibyo, *Politik Media dan Pertarungan Wacana* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 129.

dipahami sebagai konstruksi sosial atau ideologi yang bertarung dibalik praktik jurnalistik atau kinerja media (*media performance*).<sup>7</sup>

Media dalam konteks ini dipandang sebagai instrumen ideologi, melalui mana satu kelompok menyebarkan pengaruh dan dominasinya kepada kelompok lain. Media bukanlah ranah yang netral dimana berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan mendapatkan perlakuan yang sama dan seimbang. Media justru bisa menjadi subjek yang mengkonstruksi realitas berdasarkan penafsiran dan definisinya sendiri untuk disebar-kan kepada khalayak. Media berperan mendefinisikan realitas. Bahasa dalam konteks ini dianggap bukan suatu yang netral, tetapi sudah bercampur ideologi yang membawa muatan kekuasaan tertentu.<sup>8</sup> Pada titik ini, sebagaimana dikatakan Stuart Hall, praktek-praktek bahasa memantapkan tafsir makna kultural yang dimiliki oleh ideologi kelas dominan, guna mengukuhkan hegemoninya atas kelas yang lain.<sup>9</sup>

Melalui media wacana pertarungan ideologi yang bersaing digelar. Dan dalam pandangan Michael Foucault, setiap wacana terkait erat dengan kekuasaan.<sup>10</sup> Lewat media, hubungan-hubungan kekuasaan yang merasuki dan membentuk struktur masyarakat disusun, diwujudkan dan dimantapkan. Media ikut berperan menentukan dan melesatarikan konsep-konsep gila, tidak gila, sehat, sakit, benar, sesat, salah lewat kuasa yang dimilikinya.

Menurut Foucault pula pandangan seseorang tentang suatu objek dibentuk dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh struktur diskursif tersebut: wacana dicirikan oleh batasan bidang dari objek, definisi dan perspektif yang paling dipercaya dan dipandang benar. Singkatnya, wacana merupakan dasar dari pemikiran dimana pada waktu tertentu beberapa pernyataan diperhitungkan sebagai pengetahuan, tidak dengan yang lainnya.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Idi Subandy Ibrahim, "Retorika Citra" Muslim di Media: Dari Spiritualitas Untuk Berperang Menuju Spiritualitas untuk Berdialog", dalam Idi Subandy Ibrahim, *Media dan Citra Muslim: dari Spiritualitas Untuk Berperang menuju Spiritualitas untuk Berdialog* (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), xxiii.

<sup>8</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisa Teks Media* (Yogyakarta: LkiS, 2001), 343.

<sup>9</sup> Dennis McQuail, *Mass Communication Theory* (London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 2000), 307.

<sup>10</sup> Michael Foucault, *Archeology of Knowledge*, translated by A.M. Sheridan Smith (London: Tavistok and New York, 1972), 53.

<sup>11</sup> Diane MacDonell, *Teori-Teori Diskursus*, Terj. Eko Wijayanto (Jakarta: Teraju, 2005),

Dalam kerangka inilah dapat dikatakan bahwa sebuah wacana dalam media amat terkait dengan bahasa dan praktis politik. Dan bahasa tidaklah semata-mata soal teks, tetapi lebih dari itu merupakan cermin dari konstelasi kekuatan yang bermain-main dalam proses pembentukan dan reproduksi makna. Bahasa bukanlah medium netral, tetapi medan pertarungan simbolik dari representasi-representasi subjek yang berada di belakangnya. Dengan demikian wacana dalam media dapat dianggap sebagai ruang bagi pagelaran kuasa-kuasa tertentu. Hal ini niscaya karena pada dirinya pekerjaan media adalah membingkai wacana dan mengkonstruksi realias. Kemampuan media massa dalam membangun wacana merupakan bagian dari upaya yang dilakukan media dalam mengkonstruksi makna. Wacana media adalah salah satu bagian dari wacana publik. Media, dalam persektif ini, memainkan peranan dan fungsi yang kompleks. Media adalah bagian dari proses produksi budaya, sekaligus politik.

Dan dalam konteks media Islam, media memegang peranan penting, sebagai corong bagi wacana alternatif sekaligus simbol perlawanan terhadap ideologi yang dominan dan hegemonik. Media-media partisan berbasiskan agama dengan segala orientasi politik, persepsi, streotipe, pemikiran, teori dan ideologi pada skala tertentu mendasarkan mediana sebagai bentuk identifikasi diri, artikulasi politik sekaligus media perlawanan terhadap apa yang dipersepsikannya sebagai bentuk kezaliman.

Antonio Gramsci melihat media sebagai ruang dimana berbagai ideologi direpresentasikan. Ini berarti, di satu sisi media bisa menjadi sarana penyebaran ideologi penguasa, alat legitimasi dan kontrol atas wacana publik. Namun di sisi lain, media juga bisa menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan. Media bisa menjadi alat untuk membangun kultur dan ideologi dominan bagi kepentingan kelas dominan, sekaligus juga menjadi intrumen perjuangan bagi kaum tertindas untuk membangun ideologi dan kultur tandingan.<sup>12</sup> Media dapat menjadi saluran bagi ideologi untuk mengembangkan perlawanan dan bekerja mematahkan hegemoni. Media seperti ini dapat pula dimaknai sebagai manifestasi kesadaran kritis dan perang budaya terhadap

---

102.

<sup>12</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisa Wacana, Analisa Semiotik, dan Analisa Framing* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 30.

hegemoni ideologi dominan.

Media-media Islam juga tampil tak lepas dengan warna ideologisnya; dari yang idealis, moderat hingga liberal dalam mengkonstruksikan sebuah peristiwa. Konstruksi tentang konflik keagamaan dalam media Islam misalnya, juga tampil beragam sesuai dengan corak ideologi keagamaan yang diusungnya. Media-media yang cenderung idealis dan bertopang pada spirit nilai bahwa Islam adalah sistem yang komprehensif dan *kaffah* dalam segala bidang, cenderung menempatkan konflik keagamaan sebagai realitas konflik yang menyeret kepada sikap keberpihakan dan pembelaan. Sementara media dengan spektrum warna ideologi yang lebih moderat hingga liberal memiliki kecenderungan untuk mewarnai media dengan tulisan yang lebih bersifat inklusif dan menempatkannya sebagai persoalan yang kompleks.

Hal ini menjadi keniscayaan karena media tidaklah berdiri dalam ruang hampa udara sosial. Media senantiasa berkelindan dan berinterrelasi dengan faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi peliputan media. Orientasi ideologi, politik, persepsi, stereotipe, pemikiran dan teori individu jurnalis juga mempengaruhi tampilan dan content media. Dalam konteks ke-Islaman, preferensi ideologis dan mazhab pemikiran dan keberagaman individu jurnalis dan mungkin saja organisasi media dapat membentuk dan mempengaruhi cara menyajikan fakta, menafsirkan dunia, menulis, berbicara atau bertindak.

### **Wacana Media Islam Online dalam Isu Relasi Mayoritas-Minoritas**

Secara general bingkai wacana media Islam online lebih memposisikan diri sebagai “pihak yang terlibat” dalam merumuskan relasi mayoritas-minoritas. Sebagai media yang berlabel Islam, baik Republika Online, Dakwatuna.com maupun Hidayatullah.com tidak bisa menghindari keberpihakannya ketika mengkonstruksi insiden Tolikara dan Aceh Singkil yang menyeret isu relasi mayoritas-minoritas. Umat Islam minoritas di Tolikara dikonstruksi sebagai pihak yang mengalami ketidakadilan karena tidak adanya jaminan kebebasan menjalankan ibadah di tengah mayoritas Kristiani. Sementara posisi mayoritas umat Islam di Aceh Singkil digambarkan sebagai “masyarakat yang terpicu” karena minoritas Kristiani yang tidak taat asas dalam membangun rumah ibadah.

Ketiga media Islam online yang dianalisis menilai kehadiran negara dalam melindungi dan menjamin hak kebebasan beragama tidak optimal dan maksimal. Negara dipandang tidak hadir manakal minoritas Islam di Papua mengalami intimidasi dan kekerasan dari mayoritas Kristiani di Papua. Sementara di Aceh Singkil, reperesentasi negara di daerah dikonstruksi tidak mampu menjaga dan menegakkan aturan-aturan yang ada dalam hal pendirian rumah ibadah bagi kalangan minoritas di tengah mayoritas.

Baik Republika Online, Dakwatuna.com maupun Hidayatullah.com mendalilkan terjadinya disharmoni kerukunan beragama juga disebabkan sikap intoleransi yang dikembangkan umat beragama. Dalam kasus Tolikara, ketiga media Islam sepakat bahwa sikap intoleransi sekelompok umat Kristiani lewat edaran larangan beribadah bagi minoritas muslim di Papua telah memprovokasi dan memecah kerukunan beragama di Papua. Surat edaran GIDI sekaligus menjadi penanda bahwa relasi mayoritas-minoritas berjalan dalam kerangka yang dominatif dan hegemonik. Sebaliknya, pada kasus Aceh Singkil, ketiga media tidak melihat semata pada ketidakdewasaan dan kekurangsaan umat Islam sebagai variabel satu-satunya bagi tercederainya relasi mayoritas-minoritas yang harmonis, tetapi mencoba memutar wacana --untuk tidak mengatakan mengalihkan wacana-- dengan menempatkan pangkal persoalan pada ketidaktaatan minoritas Kristiani dalam menjalankan aturan pendirian rumah ibadah.

Aspek lain yang tersirat dari wacana relasi mayoritas-minoritas yang tercermin dari kasus Tolikara dan Aceh Singkil pada ketiga media Islam lain adalah kemungkinan “bermainnya” variabel lain yang turut serta mendekonstruksi relasi keberagamaan, terutama di Tolikara. Republika Online, Dakwatuna.com dan Hidayatullah.com mensinyalir adanya kecemburuan ekonomi dan motif politik tersembunyi yang memperkeruh suasana keberagamaan di tanah Papua. Indikasi kecemburuan ekonomi tidak dijelaskan secara eksplisit oleh ketiga media, tetapi motif politik tersembunyi dimaknai sebagai manifestasi dari agenda politik nasional ataupun global kelompok tertentu yang berupaya menunggangi isu agama untuk tujuan kepentingan ideologi dan politik. Sementara untuk kasus Aceh Singkil, variabel lain yang diduga ikut memicu retaknya kerukunan beragama adalah respon pemerintah yang lambat dalam menangani dan mengantisipasi “menjamurnya” gereja ilegal di

tengah mayoritas muslim.

Jalur hukum dipilih sebagai solusi oleh ketiga media Islam ini dalam menuntaskan peristiwa Tolikara dan Insiden Aceh Singkil. Dalam pandangan ketiga media Islam ini, pelaku rusuh Tolikara harus dihukum karena telah melanggar hak asasi manusia dan merusak relasi mayoritas-minoritas di Papua. Sebaliknya sikap tidak tegas ditunjukkan ketiga media untuk menuntut penyelesaian hukum terhadap pelaku perusakan gereja di Aceh Singkil. Pada posisi ini arah wacana ketiga media Islam memang terlihat dikonstruksi untuk melihat peristiwa dari sudut pandang “kepentingan” umat Islam.

Hal menarik lainnya adalah ketiga media Islam online ini menangkap kesan bahwa ada perlakuan yang tidak adil dan berimbang yang dilakukan pemerintah terhadap minoritas muslim di tengah mayoritas non muslim dan minoritas non muslim di tengah mayoritas muslim di Indonesia. Ketidakadilan itu dikonstruksi terutama oleh Dakwatuna.com dan Hidayatullah.com dengan menunjuk pada perlakuan yang berbeda aparaturnya dalam menjaga minoritas umat Kristiani ketika merayakan hari keagamaannya, sementara minoritas muslim yang menjalankan ibadah dan merayakan keagamaan di tengah mayoritas non muslim “seolah” dibiarkan tanpa perlindungan.

Jadi ada benang merah yang sama dari ketiga media Islam online tersebut dalam menyikapi kehidupan keberagaman di Indonesia dalam konteks relasi mayoritas dan minoritas di Indonesia. Perbedaan konstruksi wacana lebih pada model narasi yang disajikan dan narasumber yang dilibatkan. Tetapi titik krusialnya adalah model pengkonstruksian ini menyiratkan dan meniscayakan perbedaan platform keagamaan dari ketiga media Islam ini. Walaupun untuk mengetahui secara detail platform keagamaan tiga media Islam ini dibutuhkan penelusuran lebih jauh lewat penyingkapan mendalam dengan metode penelitian yang ada.

Republika Online berupaya memotret relasi mayoritas-minoritas dengan penyajian yang moderat. Media Islam yang dibidani ICMI ini berusaha menjaga keseimbangan di antara narasumber yang ada dan gaya bahasa yang digunakan. Keseimbangan aspirasi dan suara Islam diwadahi Republika Online dengan menghadirkan otoritas ulama yang representatif mewakili umat Islam, tetapi sumber otoritas resmi negara juga dihadirkan untuk menklarifikasi isu sekaligus menjaga keseimbangan dalam pemberitaan. Republika

Online lebih memilih bahasa deskriptif untuk menggambarkan keseluruhan wacana relasi mayoritas-minoritas. Sekalipun begitu, advokasi terhadap umat Islam dalam konteks Tolikara dan Aceh Singkil tetap dilakukan lewat penghalusan bahasa dan suara tajam narasumber yang dipilih.

Keberpihakan terhadap nasib minoritas muslim di Tolikara dan mayoritas muslim di Aceh Singkil ditunjukkan Dakwatuna.com lewat seluruh tubuh pemberitaan. Narasumber yang terpilih sengaja dihadirkan untuk melukiskan dan menggambarkan posisi umat Islam yang lemah dan tertindas, baik sebagai minoritas maupun mayoritas. Gaya bahasa yang diusung Dakwatuna.com sarat dengan advokasi dan pembelaan terhadap umat Islam. Hal yang sama ditunjukkan Hidayatullah.com lewat strategi pemilihan narasumber dan struktur narasi advokatif yang lebih melihat persoalan sebagai ketidakberpihakan negara terhadap umat Islam, baik ketika dalam posisi minoritas maupun mayoritas.

Pada titik ini dapat disimpulkan bahwa konstruksi ketiga media Islam online dalam konteks relasi mayoritas-minoritas lebih menempatkan diri sebagai pihak yang terlibat ikut merumuskan bagaimana seharusnya hubungan keberagaman tersebut ditata. Pemaknaan Republika Online, Dakwatuna.com dan Hidayatullah.com terhadap kedua insiden yang menyeret isu relasi mayoritas-minoritas memang terlihat berpihak, tetapi dalam konteks tertentu hukum dan aturan keberagaman masih menjadi pilihan dan jalan keluar yang dikedepankan dalam mengurai hubungan mayoritas-minoritas di Indonesia.

### **Wacana Media Islam Online tentang Isu Radikalisme**

Bangunan wacana Republika Online, Dakwatuna.com dan Hidayatullah.com tentang radikalisme di Indonesia dengan berkaca pada konstruksi tentang pemblokiran situs media Islam lebih menyoroti pada kebijakan penanganan radikalismenya dibanding menelisik lebih jauh muatan-muatan, dalam media Islam khususnya, yang diduga BNPT menebarkan benih radikalisme dan fundamentalisme. Ketiga media Islam ini kompak mengkritik langkah BNPT yang menggandeng Kemenkominfo untuk memblokir 19 situs media Islam. Kekompakan tiga situs media online ini seolah menutup daya jelajah media untuk “kembali masuk ke dalam” dan menginvestigasi

apakah benih muatan radikalisme itu benar adanya atau memang hanya stigma pemerintah terhadap media Islam.

Secara umum langkah dan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi tumbuh berkembangnya benih radikalisme di media ini dikritik karena diasumsikan tidak menggunakan ukuran yang jelas tentang apa yang disebut dan dituduhkan sebagai radikalisme. Definisi radikalisme yang digunakan negara untuk menutup situs Islam dianggap monolitik dan tidak berdasar. Pemerintah sebagai representasi negara seolah bertindak sebagai penafsir tunggal yang berhak memaknai dan mengeksekusi istilah radikalisme. Pemerintah dianggap gegabah menafsirkan radikalisme tanpa melibatkan otoritas keilmuan agama untuk merumuskan definisi dan standar radikalisme tersebut. Karena bagaimana pun radikalisme adalah “kata problematik” ketika dihubungkan dengan agama.

Ketiga situs media Islam ini memandang bahwa pemerintah telah keliru menggunakan kata radikalisme sebagai dalih untuk memblokir media Islam. Pelabelan radikalisme pada media Islam dinilai tendensius dan bias kepentingan untuk memojokkan media Islam dan umat Islam. BNPT dan Kemenkominfo seolah menggiring dan menggeneralisir bahwa media Islam berbahaya karena menyebarkan virus radikalisme, tanpa menunjuk secara nyata konten mana pada media Islam yang menyebarkan radikalisme agama tersebut.

Baik *Republika Online*, *Dakwatuna.com* dan *Hidayatullah.com* mensinyalir bahwa radikalisme adalah kata yang seringkali dimunculkan untuk mendiskreditkan Islam dan umat Islam. Ketakutan terhadap Islam atau Islamophobia membuat Islam selalu dilihat sebagai ancaman. Penutupan situs media Islam adalah impact dari paradigma bahwa Islam adalah ancaman bagi negara. Padahal dalam argumentasi ketiga situs Islam ini, umat Islam lah yang memiliki andil dan kontribusi terbesar dalam mendirikan NKRI.

Langkah pemerintah memblokir situs media Islam dianggap kontraproduktif dan malah menimbulkan antipati sebagian umat Islam. Sikap turunan dari hal tersebut adalah alih-alih meredam radikalisme, langkah pemerintah dinilai malah menyuburkan radikalisme. Ketiga media Islam online juga bergumentasi bahwa sikap pemerintah bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi yang tengah dibangun.

Dari ketiga media online yang dianalisis yaitu Republika Online, Dakwatuna.com dan Hidayatullah.com, Dakwatuna.com dan Hidayatullah.com adalah bagian dari media yang diblokir pemerintah. Namun demikian ketiga media memiliki sikap yang sama terkait dengan langkah pemerintah dalam memblokir situs Islam yang diduga menyebarkan radikalisme. Tentu saja ada perbedaan mengkonstruksi persoalan radikalisme dalam media di antara ketiga media Islam tersebut. Tetapi perbedaan konstruksi lebih menonjol pada wilayah bagaimana narasi kritik itu disampaikan. Dan ini berimplikasi pada pemilihan narasumber dan gaya bahasa yang digunakan.

Republika Online berdiri sebagai media mainstream Islam yang dikenal dengan sikap moderat keislamannya, karena kelahirannya dibidani ICMI. Republika Online berupaya menjaga keseimbangan berita dengan tetap menampilkan pelibat wacana dari otoritas negara sebagai pembanding arah wacana. Republika Online juga menampilkan standar radikalisme yang dipegang BNPT untuk memblokir situs media Islam dalam pemberitaan. Hal yang sama tidak dilakukan oleh kedua media Islam yang dianalisis. Sekedar mengulang kembali, Republika Online misalnya menuliskan kriteria radikalisme versi BNPT yaitu *pertama*, yakni radikalisme bisa ditimbulkan dari ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan mengatasnamakan agama. *Kedua*, mengkafirkan orang lain. *Ketiga*, mendukung, menyebarkan dan mengajak bergabung dengan ISIS. Terakhir, memaknai jihad secara terbatas.

Sementara Dakwatuna.com dikenal sebagai media ummat yang dekat dengan Partai Keadilan Sejahtera sehingga militansi perjuangan keumatan mewarnai media ini. Sedangkan Hidayatullah.com dikembangkan lewat jaringan pesantren Hidayatullah yang tersebar di nusantara. Kedua media Islam ini termasuk media yang diblokir Kemenkominfo. Narasi keduanya banyak diwarnai bahasa advokasi, kritik dan pembelaan diri terhadap label radikalisme. Jadi pada kesimpulannya mereka menolak keras pelabelan dan pemblokiran tersebut. Baik Dakwatuna.com maupun Hidayatullah.com menganggap pemerintah telah berlaku sewenang-wenang dengan menggunakan tafsir sepihak atas makna radikalisme kemudian menjadikannya sebagai standar untuk melakukan pemblokiran.

## **Kesimpulan**

Dengan menyandarkan diri pada hasil analisis teks lewat penggunaan model wacana Haliday dapat disimpulkan bahwa bingkai wacana media Islam online lebih memosisikan diri sebagai “pihak yang terlibat” dalam merumuskan relasi mayoritas-minoritas. Sebagai media yang berlabel Islam, baik Republika Online, Dakwatuna.com maupun Hidayatullah.com tidak bisa menghindari keberpihakannya ketika mengkonstruksi insiden Tolikara dan Aceh Singkil yang menyeret isu relasi mayoritas-minoritas. Umat Islam minoritas di Tolikara dikonstruksi sebagai pihak yang mengalami ketidakadilan karena tidak adanya jaminan kebebasan menjalankan ibadah di tengah mayoritas Kristiani. Sementara posisi mayoritas umat Islam di Aceh Singkil digambarkan sebagai “masyarakat yang terpicu” karena minoritas Kristiani yang tidak taat asas dalam membangun rumah ibadah.

Ketiga media Islam online yang dianalisis menilai kehadiran negara dalam melindungi dan menjamin hak kebebasan beragama tidak optimal dan maksimal. Negara dipandang tidak hadir manakal minoritas Islam di Papua mengalami intimidasi dan kekerasan dari mayoritas Kristiani di Papua. Sementara di Aceh Singkil, representasi negara di daerah dikonstruksi tidak mampu menjaga dan menegakkan aturan-aturan yang ada dalam hal pendirian rumah ibadah bagi kalangan minoritas di tengah mayoritas.

Sementara bangunan wacana Republika Online, Dakwatuna.com dan Hidayatullah.com tentang radikalisme di Indonesia dengan berkaca pada konstruksi tentang pemblokiran situs media Islam lebih menyoroti pada kebijakan penanganan radikalismenya dibanding menelisik lebih jauh muatan-muatan, dalam media Islam khususnya, yang diduga BNPT menebarkan benih radikalisme dan fundamentalisme. Ketiga media Islam ini kompak mengkritik langkah BNPT yang menggandeng Kemenkominfo untuk memblokir 19 situs media Islam. Kekompakan tiga situs media online ini seolah menutup daya jelajah media untuk “kembali masuk ke dalam” dan menginvestigasi apakah benih muatan radikalisme itu benar adanya atau memang hanya stigma pemerintah terhadap media Islam.

### Daftar Pustaka

- Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisa Teks Media* (Yogyakarta: LkiS, 2001).
- Foucault, Michael, *Archeology of Knowledge*, translated by A.M. Sheridan Smith (London: Tavistok and New York, 1972).
- Ibrahim, Idi Subandi (ed.), *Media dan Citra Muslim: dari Spiritualitas Untuk Berperang menuju Spiritualitas untuk Berdialog* (Yogyakarta: Jalasutra, 2005).
- MacDonell, Diane, *Teori-Teori Diskursus*, Terj. Eko Wijayanto (Jakarta: Tera-ju, 2005).
- McQuail, Dennis, *Mass Communication Theory* (London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications, 2000).
- Renaldi, Adrian, *Radikalisme Agama Ancaman bagi Pemilu 2004?*, dalam [www.sinarharapan.co.id](http://www.sinarharapan.co.id) (2004).
- Sobur, Alex, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisa Wacana, Analisa Semiotik, dan Analisa Framing* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006).
- Sudibyo, Agus, *Politik Media dan Pertarungan Wacana* (Yogyakarta: LkiS, 2001).

### Website

- <http://www.dakwatuna.com>
- <http://www.hidayatullah.com>
- <http://Republika.co.id>
- <http://www.voaindonesia.com/content/pelanggaran-kebebasan-beragama-meningkat-/3203566.html>
- <http://www.tempo.co/read/opiniKT/2016/01/22/11652>

